

ASPEK PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MALANG

by Lalu Mulyadi

Submission date: 22-Jan-2018 11:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 905185647

File name: 38._Jurnal_NATAH_2009_OK.doc (89K)

Word count: 3790

Character count: 25722

ASPEK PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MALANG

Lalu Mulyadi

Email : lalu_mulyadi@yahoo.com

Staf Pengajar Teknik Arsitektur ITN Malang

Agung Murti Nugroho

Staf Pengajar Teknik Arsitektur UB Malang

ABSTRACT

At the present time, the application of policy management of urban green open space of Malang have many weakness that caused by overlapping management. The urban management consist of several basic activities, including planning and controlling, organizing, human resources, coordination and financing. The prominent indicator associated with the managing urban green open space that related to the aspect of problems lingered around regulation of law bureaucracy and bureaucrat agent. This paper discusses the management aspect of urban green open space in Malang. The users perception about the priority of urban green open space management were investigated using questioner and SPSS analyze technique. The results indicated that the planning aspect of urban green open space is main priority in providing the good urban green space management especially ecological balance. Therefore, the recommendation based on user perception are the strategy of ecological planning, evaluation organization, land use coordination, government finance and officer human resources proportion.

Key Word : urban open space management, ecological balance.

INTISARI

Dewasa ini, penerapan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Malang mempunyai kelemahan yang disebabkan pengelolaan yang tidak terpadu. Pengelolaan kota terdiri atas aktifitas perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan. Indikator yang ada terhubung dengan pengaturan ruang terbuka hijau kota yang sesuai dengan aspek dari masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum, birokrasi dan birokrat. Makalah ini mengkaji aspek pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Malang. Persepsi pengguna tentang aspek prioritas pengelolaan ruang terbuka hijau dengan penyebaran kuesioner dengan teknik analisis SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek utama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Malang adalah aspek perencanaan khususnya keseimbangan ekosistem. Sehingga rekomendasi pengelolaan menurut pandangan pengguna meliputi strategi perencanaan ekologi, evaluasi kelembagaan, koordinasi tata guna lahan, pendanaan pemerintah dan proporsi sumber daya manusia pengelola.

Kata Kunci : *Pengelolaan ruang terbuka hijau, keseimbangan ekologi*

Pendahuluan

Pembangunan kota Malang dengan segala aktifitasnya menyebabkan berkembangnya kota, namun pada sisi lain juga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan kota. Pembangunan fisik kota cenderung terus

membengkak, menimbulkan fenomena struktur fisik kota menuju arah maksimal; ruang terbuka hijau menuju arah minimal; serta kecenderungan mengubah wajah lingkungan kota. Disisi lain, ruang terbuka hijau dapat berperan dalam memberikan perlindungan dan peningkatan bagi lingkungan alami, serta memberikan keuntungan dalam jangka panjang (Scottish Executive Publications, 2006). Keuntungan dari keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan menurut Roseland (1998), dapat ditinjau dari sudut keuntungan ekonomi yaitu ruang terbuka hijau secara signifikan dapat mengurangi biaya penggunaan energi dan air. Vegetasi dapat mengendalikan cahaya, keteduhan, angin dan silauan cahaya. Dapat mendinginkan bangunan pada musim panas dan mencegah kehilangan panas di dalam musim dingin (Roseland, 1998; Miller, 1997; CMHC, 1982). Dengan menempatkan vegetasi yang tepat dalam hubungan dengan lingkup bangunan, 20-25% dari rerata biaya energi kediaman dapat disimpan dan diamankan. Ditinjau dari sudut manfaat ekologis dapat dikatakan bahwa, ruang terbuka hijau menyediakan habitat untuk binatang-binatang seperti berbagai burung, ikan, dan lain-lain. Menurut Dorward (1990), ruang terbuka hijau juga menyediakan jalur hijau dan koridor-koridor untuk menghubungkan habitat-habitat tersebut. Dapat mencegah erosi tanah (CMHC, 1982), menyerap air hujan, dengan demikian meningkatkan sistem drainase (Roseland, 1998).

Permasalahan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota Malang adalah belum terintegrasinya institusi pengelolaan RTH di Malang. Pengelolaan masih dilakukan partial dan sektoral, belum efisien dan efektif dalam rangka menghasilkan kualitas dan kuantitas RTH, serta belum melibatkan semua stakeholder termasuk para ilmuwan. Ditemui banyak fakta bahwa dalam pengelolaan ruang terbuka hijau lah berubah fungsi menjadi penggunaan lain (Ditjen Bangda Depdagri, 1994). Ruang terbuka hijau tampaknya masih mempunyai makna pelengkap / penyempurna bagi perkotaan, sehingga ruang terbuka hijau dianggap hanya sebagai penambah estetika lingkungan. Kompetisi penggunaan lahan di perkotaan banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar, sehingga banyak terjadi perubahan penggunaan lahan terbuka hijau menjadi area permukiman, pertokoan, hotel, pompa bensin, restoran. Kurangnya pengendalian aparat pemerintahan terhadap perkembangan kota Malang serta keterbatasan kemampuan sumber manusia instansi pengelolaan pemerintah dalam hal wawasan profesionalismenya merupakan hal permasalahan utama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Hal ini ditambah beragamnya pemahaman fungsi dan pendeskripsian ruang terbuka hijau dari instansi Dinas Pertamanan, Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan yang terkait dalam pengelolaannya. Faktor lain adalah masalah ketersediaan tanah di perkotaan sebagai lahan hijau yang terbatas dan masalah pendanaan pembangunan ruang terbuka hijau. Dari uraian di atas ditemukan adanya indikasi penyebab permasalahan ruang terbuka hijau yang menyangkut aspek pengelolaan ruang terbuka hijau di Malang.

Pengelolaan ruang terbuka hijau adalah pendekatan yang menyeluruh terutama pada kota-kota di negara-negara berkembang. Pemda adalah daya penggerak yang oleh karena itu dilihat ketika yang diperlukan untuk mengintegrasikan seluruh pemain dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Pengalaman itu mungkin mencerminkan proses dalam kaitan dengan:

- a. Adanya satu strategi pengelolaan kota terintegrasi
- b. Memfokuskan pada keduanya, yaitu urban dan tantangan pengembangan institusional
- c. Memastikan hubungan yang selaras antara perencanaan dan penganggaran.

Beberapa unsur utama akan disajikan sebagai bagian dari aspek manajemen strategis untuk mengarahkan pengelolaan ruang terbuka hijau kota. Pertama, manajemen strategis menekankan pentingnya stakeholder, mencakup komunitas dan agensi terlibat dalam semua proses implementasi perencanaan agar perencanaan mau mendengarkan kebutuhan komunitas. Dengan begitu, akan mendorong transparansi dan

tanggung-jawab. Kedua, proses manajemen strategis adalah satu keputusan dan tindakan tentang apa yang harus dikerjakan, mengapa untuk melakukannya dan siapa harus melakukan itu. Itu menekankan bahwa pengukuran efektivitas strategi dan tindakan dalam mencapai objektif tata kota harus memfokuskan pada kemajuan dari semua aspek publik wellbeing mencakup fisik, ekonomi, sosial, dimensi lingkungan dan institusional. Ketiga, manajemen strategis bertanggung-jawab terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan suatu kota. Sebuah pemahaman jelas dari lingkungan eksternal, dan kekuatan internal yang memungkinkan sumber daya manusia untuk memberikan perubahan didalam tata kota. Keempat, manajemen strategis memungkinkan monitoring evaluasi yang efektif (internal) dan (eksternal). Akhirnya, manajemen strategis mengenali bahwa keberhasilan implementasi dari strategi memerlukan dukungan pembiayaan dari institusi tata kelola yang meliputi kerjasama di antara semua tingkatan pemerintah, sektor swasta dan komunitas. Itu mendorong dan memberikan fasilitas keterlibatan dari semua stakeholder serta kelompok minat dalam semua langkah-langkah manajemen tata kota. Sebagai hasilnya, kebijakan pengembangan kota lebih responsive pada nilai komunitas dan oleh karena itu mempunyai kesempatan untuk berhasil. Lima aspek strategis yang digunakan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota, mengikuti penelitian sebelumnya tentang variabel, aspek pengelolaan kota yaitu: perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pembiayaan.

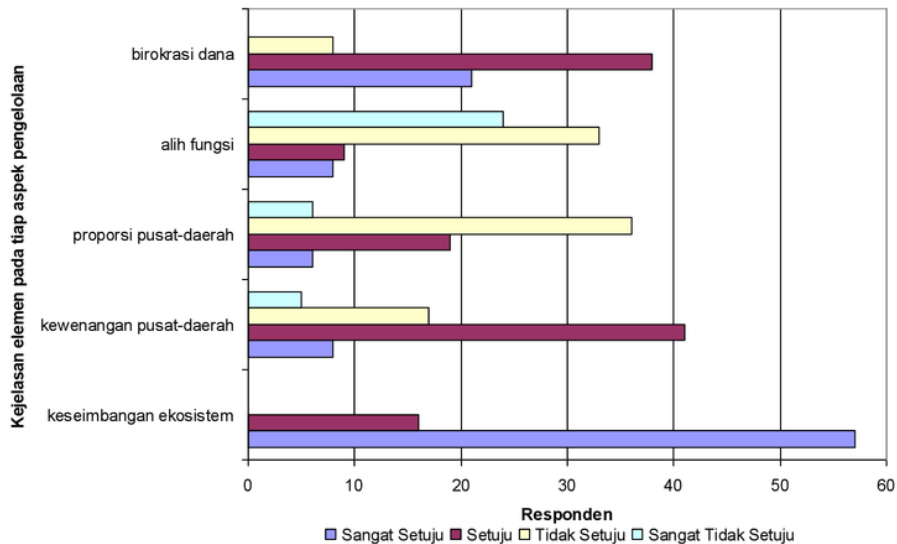
Pembahasan

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Malang melibatkan beberapa instansi pemerintah daerah antara lain; dinas pertamanan kota, Bapeda dan Departemen Pekerjaan Umum. Secara umum ruang terbuka hijau diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Perkembangan fisik di Kota Malang dalam 5 tahun ini mengalami perkembangan pesat, terutama perdagangan (kawasan pusat kota) dan perumahan (Malang bagian Timur Laut dan Malang bagian Barat Laut). Tapi perkembangan tersebut tidak merata, dimana pada kawasan timur dan selatan (Malang bagian Tenggara dan Malang bagian Barat Daya) perkembangannya tidak terlalu cepat (bahkan tidak berkembang sesuai dengan rencana RTRW lama). Sehingga terjadi beberapa penyimpangan antara rencana tata ruang yang ada (RTRW Kota Malang tahun 1993) dengan kondisi eksisting. Seiring dengan perkembangan fisik kota, kota Malang kekurangan ruang terbuka hijau. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala/masalah yaitu banyaknya taman kurang terawat, kurangnya lapangan olah raga, banyaknya perumahan yang menghabiskan seluruh kavling rumahnya untuk dibangun, banyaknya perumahan atau jalan perumahan tidak ada pepohonan peneduhnya dan sebagainya

Pada bagian ini akan dievaluasi secara menyeluruh elemen-elemen apa yang secara jelas nampak pada masing-masing aspek pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Malang. Kejelasan elemen ditunjukkan oleh perbandingan yang signifikan antara jawaban sangat setuju dan setuju dengan jawaban sangat tidak setuju dan setuju. Secara umum pada aspek perencanaan merupakan elemen keseimbangan ekosistem merupakan aspek yang paling jelas. Pada aspek kelembagaan elemen kewenangan pusat dan daerah merupakan elemen yang paling jelas. Sedangkan pada aspek sumber daya manusia elemen terjelas adalah proporsi SDM di pusat dan daerah. Pada aspek koordinasi elemen terjelas adalah alih fungsi. Pada bagian pendanaan, aspek terjelas adalah pada birokrasi pemerintah. Untuk pembahasan selanjutnya maka elemen-elemen tersebut diperbandingkan seperti pada gambar 1.

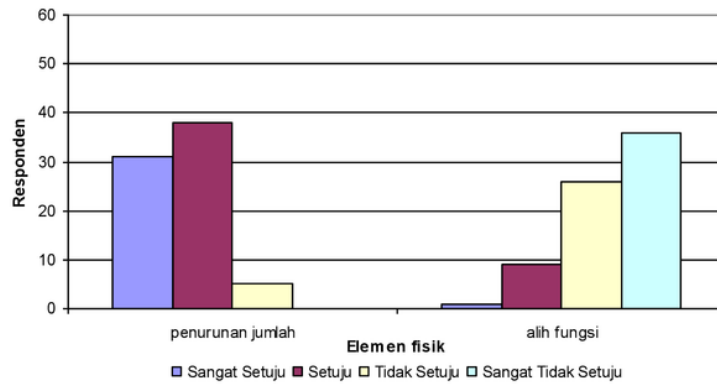
Berdasarkan pada gambar 1 maka dapat dilihat aspek perencanaan dalam hal ini elemen ekologi aspek mempunyai proporsi yang jelas dibandingkan yang lain. Sedangkan pada urutan kedua adalah aspek kelembagaan yang menyangkut elemen

kewenangan pusat dan daerah. Ketiga adalah aspek koordinasi dalam hal ini elemen alih fungsi . Keempat adalah aspek pendanaan yang menyangkut elemen birokrasi dana dan yang terakhir adalah aspek sumber daya manusia.



Gambar 1: Kejelasan elemen pada tiap aspek pengelolaan

Untuk menjelaskan lebih mendalam tentang hasil persepsi masyarakat tentang aspek perencanaan dalam **15** pengelolaan ruang terbuka hijau maka berdasarkan penelitian terdahulu terdapat empat elemen perencanaan pengelolaan yang mempengaruhi ruang terbuka kota yaitu, elemen fisik, ekologi, partisipasi dan keterbukaan. Keempat elemen tersebut dijabarkan dalam sejumlah pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan kepada lebih dari 100 responden. Berdasarkan kuesioner diperoleh hasil komponen utama fisik ruang terbuka yang terlihat jelas menurut pengguna adalah adanya penurunan jumlah ruang terbuka hijau di Kota Malang dan alih fungsi ruang terbuka hijau (gambar 2). Sebagian besar responden (lebih dari 90 persen) setuju **5** bahwa terjadi penurunan jumlah ruang terbuka hijau di kota Malang. Hal lain adalah **sebagian besar** pengguna tidak setuju apabila ruang terbuka yang ada dialih fungsikan untuk tata guna atau fungsi yang lain. Jumlah pengguna yang tidak setuju alih fungsi ini mencapai lebih dari 80 persen.

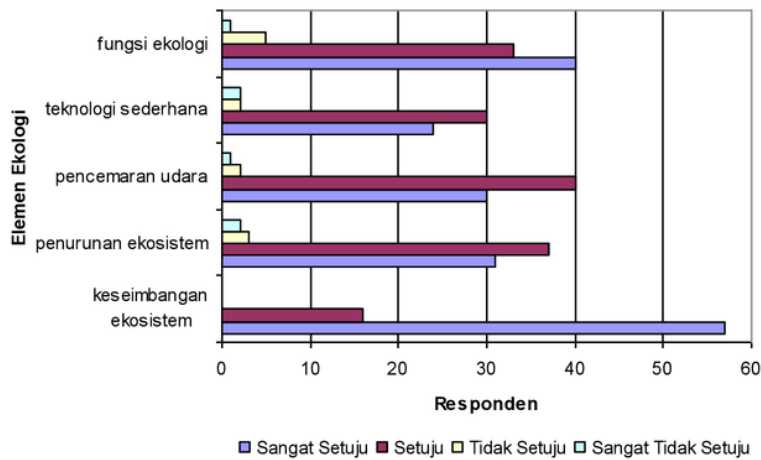


Gambar 2: Elemen fisik dalam aspek perencanaan

5

Hubungan antara penurunan ruang terbuka hijau dan alih fungsinya dapat dikatakan sangat erat. Pada umumnya penurunan jumlah ruang terbuka hijau disebabkan alih fungsi. Berdasarkan perbandingan antara dua elemen fisik tersebut maka dapat disimpulkan pengguna dalam hal ini penduduk kota Malang mengharapkan tidak adanya alih fungsi ruang terbuka hijau yang berakibat penurunan jumlahnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Morancho (2003) yang menyatakan, ada hubungan yang sama antara fungsi ruang terbuka hijau kota dengan kualitas fisik kota.

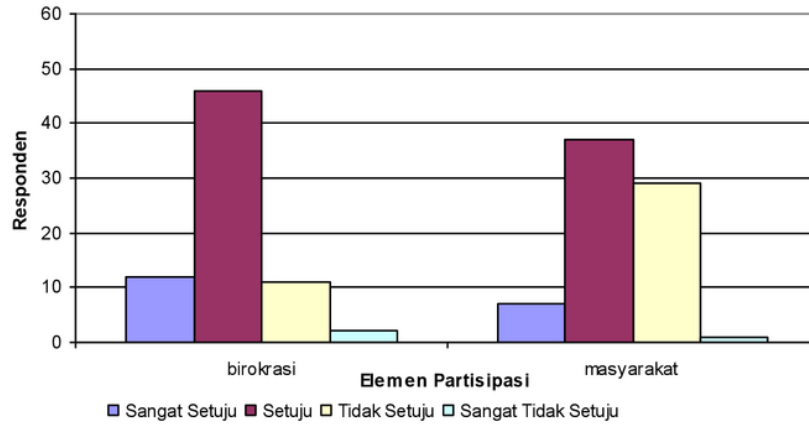
Elemen ekologi merupakan salah satu faktor penting dalam aspek perencanaan. Hal ini dapat dilihat dari persepsi pengguna ruang terbuka hijau yang setuju akan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai pembentuk kualitas ekologi kota. Dilihat dari lima pertanyaan yang diajukan menyangkut aspek ekologi maka keseimbangan ekologi merupakan faktor utama. Artinya kegunaan utama keberadaan ruang terbuka hijau menurut persepsi pengguna adalah sebagai keseimbangan ekosistem kota. Hal ini dapat dilihat dari prosentase yang sangat setuju dan setuju mencapai 100%. Elemen ekologi lain yang menonjol dan dirasakan oleh pengguna adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah faktor yang paling dirasakan akibat terjadinya ketidakseimbangan ekosistem kota. Elemen pencemaran udara mempunyai rangking kedua setelah kesadaran keseimbangan ekologi. Kedua hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3



Gambar 3: Elemen ekologi dalam aspek perencanaan

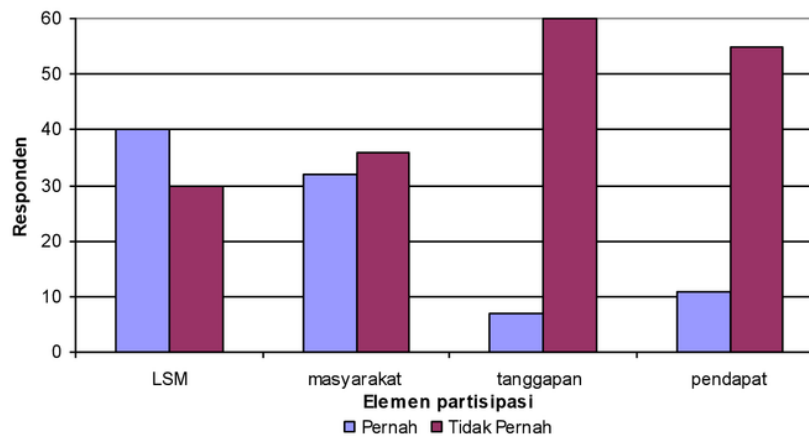
Komponen pertama (keseimbangan) dan kedua (pencemaran udara) merupakan salah satu bentuk hubungan sebab akibat, hal ini didukung komponen ketiga dan keempat sebagai komponen dominan yang dirasakan pengguna yaitu penurunan ekosistem dan pemahaman arti penting fungsi ekologi. Komponen teknologi sederhana mempunyai jumlah prosentase yang paling kecil berkaitan dengan tingkat pemahaman pengguna tentang teknologi sederhana yang dapat menggantikan keberadaan ruang terbuka hijau. Tingkat pemahaman ini berpengaruh terhadap jumlah yang mengisi pertanyaan tentang ini. Apabila dikaitkan dengan penelitian sebelumnya oleh Li et al. (2005) yang mengembangkan satu kerangka konseptual menyeluruh untuk ruang terbuka hijau di Cina dengan berbasis pada prinsip ekologi lansekap. Maka hal utama yang harus dilakukan adalah dalam aspek perencanaan adalah bagaimana menetapkan rencana ruang terbuka hijau kota agar mencapai jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan hasil questioner diatas maka prioritas yang harus dilakukan adalah menjaga keseimbangan ekosistem kota sebagai dasar mengurangi pencemaran udara dengan cara mencegah penurunan jumlah ruang terbuka hijau dan mengembalikan lagi fungsi ekologi ruang terbuka hijau melalui teknologi sederhana.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur utama perencanaan ruang terbuka hijau serta menjaga kualitasnya. Aspek perencanaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan persepsi pengguna menyangkut hal yang berkaitan birokrasi artinya selama ini aspek perencanaan ruang terbuka hijau lebih cenderung top down atau dari pusat dibanding bottom up atau mengakomodasi keinginan masyarakat. Berdasarkan hasil questioner maka aspek yang jelas terjadi adalah menurut pengguna aspek partisipasi masyarakat kurang karena adanya faktor birokrasi. Hal ini dapat dilihat dari prosentasi persepsi pengguna yang sangat setuju dan setuju aspek birokrasi yang menghambat perencanaan ruang terbuka hijau mencapai lebih 80 persen. Ketidakjelasan peran serta masyarakat terlihat masih belum jelas sehingga terjadi perbedaan yang tidak mencolok antara yang setuju dan tidak setuju terhadap faktor eksternal dalam hal ini masyarakat dalam perencanaan ruang terbuka hijau kota. Apabila di dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Branch (1970) maka diperlukan perencanaan terus menerus dan fleksibel dalam perencanaan ruang terbuka hijau kota. Pada area tertentu memang terdapat kewenangan pemerintah untuk merencanakan ruang terbuka hijau tetapi pada area lebih luas keterlibatan masyarakat merupakan hal yang mutlak agar perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menghadapi kompleksitas pertumbuhan kota.



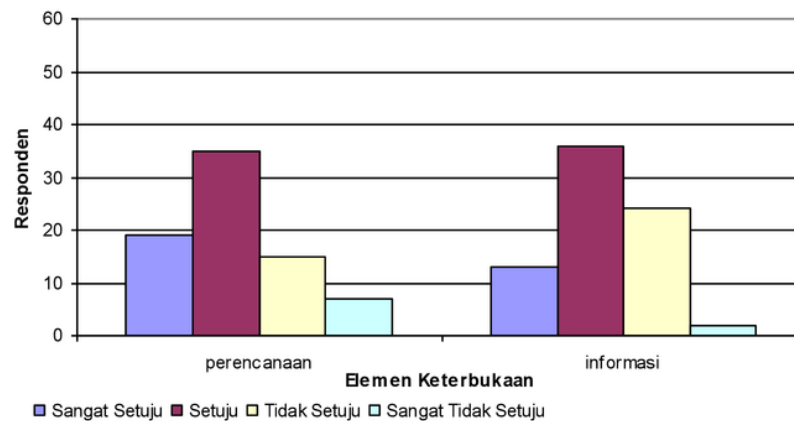
Gambar 4: Elemen partisipasi dalam aspek perencanaan

Berdasarkan hasil kuesioner yang menyangkut elemen partisipasi terlihat bahwa keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat lebih jelas dibanding keterlibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan peran LSM di Malang dalam perencanaan ruang terbuka hijau cukup berguna dan diperhitungkan. Keterlibatan masyarakat masih kurang dapat dilihat dari prosentase aspek tanggapan dan pendapat yang diminta dalam perencanaan ruang terbuka hijau. Hampir lebih dari 60 persen dan 50 persen pengguna merasa tidak pernah diminta tanggapan dan pendapatnya untuk perencanaan ruang terbuka hijau. Artinya partisipasi masyarakat adalah secara perwakilan dan bukan individu. Hal ini terkait dengan sistem perencanaan yang masih harus diperbaiki menyangkut bagaimana keterlibatan masyarakat dapat secara menyeluruh terwakili. Apakah dengan penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat memberi saran secara aktif maupun dengan pemberian penghargaan atas partisipasi masyarakat.



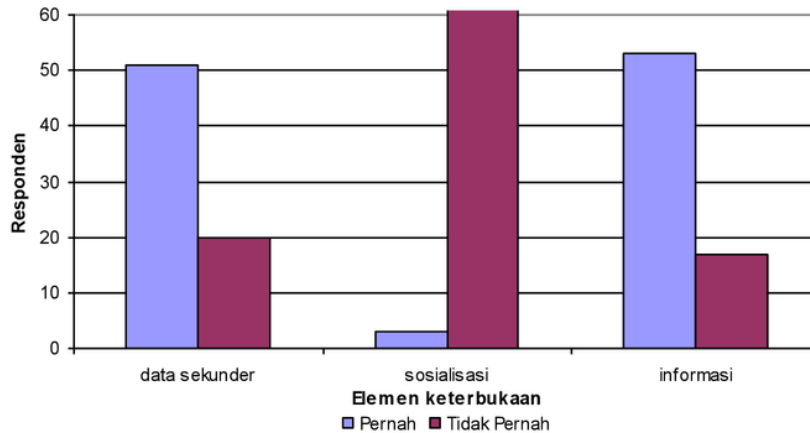
Gambar 5: Elemen partisipasi kegiatan dalam aspek perencanaan

Elemen keterbukaan merupakan salah satu aspek perencanaan terutama di era sekarang ini. Masyarakat sudah mulai sadar dan menuntut keterbukaan pemerintah khususnya dalam pengelolaan kota. Hal ini dapat dilihat dari pendapat responden tentang keterbukaan perencanaan dan penyebaran informasi ruang terbuka hijau di Kota Malang. Berdasarkan elemen keterbukaan perencanaan dapat dilihat hampir 60 persen pengguna setuju terhadap hal itu. Sedangkan pada elemen informasi hampir 50 persen pengguna sangat setuju dan setuju terhadap keterbukaan informasi. Dilihat dari prosentase tersebut dapat di tengarai bahwa pengguna mulai bersikap kritis terhadap keterbukaan rencana dan bukan hanya sekedar informasi saja artinya harus ada penjelasan lebih terhadap perencanaan ruang terbuka hijau.



Gambar 6: Elemen keterbukaan dalam aspek perencanaan

Berdasarkan hasil kuesioner terlihat bahwa kendala utama dalam keterbukaan aspek perencanaan ruang terbuka hijau adalah sosialisasi. Aspek sosialisasi dapat dikatakan kurang karena hampir 90 persen responden mengatakan tidak pernah ada sosialisasi rencana. Meskipun pada aspek informasi hampir 50 persen mengatakan pernah mendengar tentang perencanaan ruang terbuka hijau. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar responden pernah menghadapi masalah dalam mencari data sekunder tentang rencana ruang terbuka hijau di Kota Malang. Artinya secara informasi cukup memadai tetapi penjelasan lebih dalam tentang aspek perencanaan masih belum terbuka.



Gambar 7: Elemen keterbukaan kegiatan dalam aspek perencanaan

Berdasarkan hasil diatas maka apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan Chakrabarty (2001) maka persamaan yang ada adalah terdapat kemampuan reaksi sosial dan evaluasi sosial didalam perencanaan ruang terbuka hijau perkotaan. Artinya masyarakat sebagai pengguna sudah bersikap kritis yang diwujudkan dalam sikap reaksi dan evaluasi terhadap rencana pengelolaan kota. Hal ini menuntun pemerintah sebagai aktor perencanaan kota untuk tidak sekedar menyebarkan informasi tetapi memerlukan sosialisasi. Sehingga intervensi dan peraturan pemerintah mempunyai kebebasan yang lebih besar dan fleksibilitas dalam meningkatkan kinerja sektor perkotaan secara keseluruhan.

Berdasarkan data kejelasan elemen dan aspek pengelolaan diatas maka dapat dibuat sebuah strategi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Malang secara lebih sistematis. Strategi ini didasarkan pada urutan kejelasan elemen dan aspek pengelolaan. Strategi pertama adalah penanganan aspek perencanaan yang berbasis keseimbangan ekologi. Hal ini didasarkan bahwa pada aspek perencanaan elemen yang dominan adalah keseimbangan ekologi. Apabila dikaitkan dengan elemen lain maka persepsi ini masih pada tataran kondisi ideal, sehingga pada implementasinya belum berjalan. Sehingga masih diperlukan identifikasi faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam perencanaan yang lebih praktis. Setelah aspek perencanaan adalah aspek kelembagaan. Langkah utama aspek kelembagaan adalah kejelasan kewenangan pusat dan daerah. Dengan adanya kejelasan kewenangan tersebut maka perumusan peraturan daerah sebagai landasan hukum pengelolaan dan mekanisme birokrasi akan berjalan lebih baik. Setelah langkah kelembagaan dijalankan maka dilakukan langkah berikutnya yaitu aspek koordinasi untuk meminimalkan alih fungsi lahan ruang terbuka hijau dan mengoptimalkan kemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada. Pada bagian selanjutnya sistem koordinasi yang ada didukung oleh birokrasi dana yang baik. Dengan adanya birokrasi pendanaan yang baik maka peningkatan sumberdaya manusia baik di tingkat pusat dan daerah akan berjalan sinergi.

7 Kesimpulan

Keberadaan ruang terbuka hijau kota Malang sangat ditentukan oleh pengelolaannya. Tanggung jawab pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut idealnya dilakukan bersama antara pemerintah kota, swasta dan masyarakat. Penelitian ini

mencoba menggali aspek-aspek pengelolaan ruang terbuka hijau seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk membatasi aspek-aspek tersebut maka dilakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau. Berdasarkan kajian terdahulu dapat disimpulkan aspek pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi aspek perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan

Aspek-aspek tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan kuesioner dan disebarakan pada responden untuk mengetahui pemahaman dan pandangan mereka terhadap aspek pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Kejelasan elemen dan aspek pengelolaan menjadi hasil utama penelitian ini yang dijelaskan pada simpulan-simpulan dibawah ini sesuai urutan kejelasannya.

1. Aspek perencanaan merupakan mempunyai kejelasan tertinggi menurut pandangan pengguna ruang terbuka hijau. Aspek ini meliputi elemen–elemen pendukung dengan urutan terjelas sebagai berikut : elemen ekologi, elemen fisik, keterbukaan dan partisipasi. Pada komponen yang lebih rinci elemen ekologi yang berpengaruh meliputi keseimbangan ekologi, pencemaran udara, penurunan kualitas ekologi, fungsi ekologi dan terakhir teknologi. Sedangkan elemen fisik meliputi penurunan jumlah dan alih fungsi lahan. Pada elemen keterbukaan maka komponen yang nampak jelas adalah perencanaan dan informasi. Terakhir adalah elemen partisipasi yang meliputi birokrasi dan masyarakat.
2. Aspek Kelembagaan meliputi elemen–elemen pendukung dengan urutan terjelas sebagai berikut : elemen evaluasi dan pembuat keputusan, Pada elemen evaluasi faktor yang berpengaruh adalah peraturan daerah dan mekanisme birokrasi sedangkan pada pembuat keputusan adalah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.
3. Aspek Koordinasi meliputi elemen–elemen pendukung dengan urutan terjelas sebagai berikut : tata guna lahan, keputusan , informasi dan otoritas. Elemen tata guna lahan terutama pada faktor alih fungsi lahan sedangkan pada keputusan lebih pada aturan yang tegas. Pada elemen informasi mencakup aspek larangan. Sedangkan pada elemen otoritas meliputi perijinan dan aspek tumpang tindih.
4. Aspek Pendanaan meliputi elemen–elemen pendukung dengan urutan terjelas sebagai berikut : pemerintah, masyarakat dan swasta, Pada elemen pemerintah hal yang terlihat jelas adalah brokrasi dana, alokasi anggar, pencairan dana dan kewenangan. Sedangkan pada elemen masyarakat faktor sumbangan menjadi satu-satunya elemen yang mudah dilihat. Pada elemen swasta urutan yang jelas adalah sumbangan dan pajak
5. Aspek Sumberdaya Manusia meliputi elemen–elemen pendukung dengan urutan terjelas sebagai berikut : jumlah dan kualitas. Pada aspek jumlah mencakup kuantitas dan proporsi jumlah SDM di pusat dan daerah.

Ringkasnya simpulan yang dapat dirumuskan terkait dengan tujuan penelitian adalah bahwa aspek pengelolan yang menyebabkan kurang berhasilnya pengelolaan ruang terbuka hijau di Malang menurut pengguna adalah aspek perencanaan, kelembagaan, koordinasi, pendanaan dan sumber daya manusia. Dengan aspek dominan pengelolaan adalah aspek perencanaan.

Daftar Pustaka

- Ann Van Herzele, Torsten Wiedemann (2003) *A monitoring tool for the provision of accessible and attractive urban green spaces* *Landscape and Urban Planning* 63 (2003) 109–126
- Aurelia Bengochea Morancho (2003) *A hedonic valuation of urban green areas* *Landscape and Urban Planning* 66: 35–41
- Beatley, T., 2000. *Green Urbanism: Learning from European Cities*. Island Press, Washington, DC.
- Bonsignore, R.E., (2003). *The diversity of green spaces. Design Center for American urban Landscape. Design Brief, number 2/August. Design Centre for the American Urban Landscape*, University of Minnesota, Minneapolis. Available at http://www.designcenter.umn.edu/reference_ctr/publications/pdfs/db2.pdf (accessed 15 April 2007).
- Carrus, G., Passafaro, P., Bonnes, M., (2004). *Environmentalism, authoritarianism, and ethnocentrism: an attitude toward urban green scale*. *Bollettino di Psicologia Applicata* 242, 3–12.
- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskins, R.G., Sutton, P., Van den Belt, M., (1997). *The value of the world's ecosystem services and natural capital*. *Nature* 387, 253–260
- Feng Li, Rusong Wang, Juergen Paulussen, Xusheng Liu (2005) *Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles: a case study in Beijing, China* *Landscape and Urban Planning* 72 (2005) 325–336
- Hart, O.L., (1989). *The Ecology of Urban Habitat*. Chapman & Hall, London.
- Haaren, C., von Reich, M., (2006). *The German way to greenways and habitat networks*. *Landscape and Urban Planning* 76: 17–22.
- Giovanni Sanesi, Francesco Chiarello (2006) *Residents and urban green spaces: The case of Bari*. *Urban Forestry & Urban Greening* 4:125–134
- Giovanni Sanesi, Raffaele Laforteza, Mirilia Bonnes, Giuseppe Carrus *Comparison of two different approaches for assessing the psychological and social dimensions of green spaces*. *Urban Forestry & Urban Greening* 5 (2006) 121–129
- Jim, C.Y., Chen, S.W., (2003). *Comprehensive green space planning based on landscape ecology principles in compact Nanjing city, China*. *Landscape and Urban Planning* 65, 95–116.
- John P. Boentje, Mikhail S. Blinnikov (2007) *Post-Soviet forest fragmentation and loss in the Green Belt around Moscow, Russia (1991–2001): a remote sensing perspective* *Landscape and Urban Planning* 82: 208–221
- Kjell Nilsson, Ulrika Akerlund, Cecil C. Konijnendijk, Alexander Alekseev, Ole H. Caspersen, Susanne Guldager, Evgeny Kuznetsov, Alexander Mezenko, Andrey Selikhovkin, (2007) *Implementing urban greening aid projects – The case of St. Petersburg, Russia* *Urban Forestry & Urban Greening* 6 (2007) 93–101
- Klaus Seeland, Simone Nicole (2006) *Public green space and disabled users* *Urban Forestry & Urban Greening* 5: 29–34
- Konijnendijk, C.C., Randrup, T.B. (Eds.), (2002). *Editorial, Urban Forestry and Urban Greening* 1 (1), 1–4
- Li, F., Wang, R., Paulussen, J., Lui, X., (2005). *Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles: a case study in Beijing, China*. *Landscape and Urban Planning* 72, 325–336.
- Lohr, V.I., Pearson-Mims, C.H., Tarnai, J., Dillman, D.A., (2004). *How urban residents rate and rank the benefits and problems associated with trees in cities*. *Journal of Arboriculture* 30, 28–35.
- Marco Amati, Makoto Yokohari (2006). *Temporal changes and local variations in the functions of London's green belt*. *Landscape and Urban Planning* 75 (2006) 125–142

- 6 Nilsson, K., (2004). *Urban greening as a vehicle for healthy and sustainable development*. In: Working paper for design and appraisal of capacity development activities in urban environmental management. DANIDA Working Group on Experiences of Analytical Approaches to Institutional Capacity Development within the Field of Urban Environmental Management. DANIDA, Copenhagen, pp. 55–62.
- 14 Pham Duc Uy, Nobukazu Nakagoshi (2007) *Application of land suitability analysis and landscape ecology to urban greenspace planning in Hanoi, Vietnam*. Urban Forestry & Urban Greening (2007)
- 3 Pauleit, S., Kaliszuk, E., (2005). *Green structure patterns –Green structure and urban planning*. In: European Commission, 2005. Report of COST Action C11 – Green
- 23 omesburg, H.C., (1990). *Cluster Analysis for Researchers*. R.E. Krieger, Florida.
- 3 *Structure and Urban Planning*. Available at /http://www.map21ltd.com/COSTC11/S
- 4 (accessed 1 March 2007).
- Siematycki, J., (1979). *A comparison of mail, telephone and home interview strategies for household health surveys*. American Journal of Public Health 69, 238–244
- Van Veenhuizen, R., Konijnendijk, C., Gauthier, M. (Eds.), (2004). *Trees and Cities – Growing together*. Theme issue. Urban Agriculture Magazine (13).

ASPEK PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MALANG

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

usantoso.wordpress.com

Internet Source

3%

2

one-geo.blogspot.com

Internet Source

3%

3

Uy, P.D.. "Application of land suitability analysis and landscape ecology to urban greenspace planning in Hanoi, Vietnam", Urban Forestry & Urban Greening, 20080215

Publication

3%

4

www.greenspace.it

Internet Source

2%

5

seminar-vertikal-garden.blogspot.com

Internet Source

2%

6

www.nordregio.se

Internet Source

1%

7

pt.scribd.com

Internet Source

1%

espace.inrs.ca

8	Internet Source	1%
9	Submitted to University of Hong Kong Student Paper	1%
10	Submitted to Victoria University of Wellington Student Paper	1%
11	www.tandfonline.com Internet Source	1%
12	www.wsl.ch Internet Source	1%
13	Submitted to University of Liverpool Student Paper	1%
14	etds.lib.ncku.edu.tw Internet Source	1%
15	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
16	www.researchgate.net Internet Source	1%
17	iandpryanto.blogspot.com Internet Source	1%
18	www.papercamp.com Internet Source	1%
19	Submitted to University of Sheffield Student Paper	<1%

20 kanazawa-u.repo.nii.ac.jp <1%

Internet Source

21 ir.ncue.edu.tw <1%

Internet Source

22 Submitted to Universiti Teknologi MARA <1%

Student Paper

23 tsukuba.repo.nii.ac.jp <1%

Internet Source

24 edz.bib.uni-mannheim.de <1%

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography Off